

NOTULEN
Rapat Laporan Pengukuran Kinerja
Tanggal 15 Desember 2022

Hasil Rapat

1. Rapat ini diawali dengan pemaparan laporan hasil capaian atas pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

a. Level Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat masih berada pada level 2 dengan nilai 2,71, hal ini masih menuntut kerja keras semua pegawai dari Inspektorat Daerah agar segera melakukan evaluasi atas kekurangan / ketidaktercapaian level 3 Kapabilitas APIP, dan untuk tahun 2023 agar segera disiapkan baik Tim maupun evidence – evidencenya.

b. Opini BPK atas LKPD Kabupate Purwakarta → WTP → sudah mencapai target

c. Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi maupun BPK RI → masih berada pada 67% belum mencapai target yang diharapkan yaitu 80%.

d. Persentasi nilai SAKIP minimal B → 89,13% → sudah mencapai target → 80%

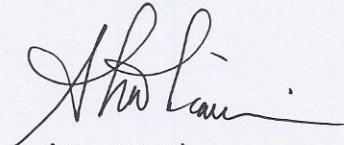
e. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) → 0 OPD, tahun 2022 Kabupaten Purwakarta tidak bisa mengusulkan OPD untuk dilakukan evaluasi sebagai WBK karena level SPIP nya masih berada pada level 2.

2. Diskusi

- Inspektur → untuk capaian tindak lanjut ini masih sangat rendah, dan kita masih mempunyai waktu sekitar 15 hari ke depan untuk meningkatkan capaian tindak lanjut.
- Inspektur Pembantu 1 → para Irban dan jajarannya belum menyelesaikan kegiatan monev dana desa, sepertinya kalau ditambah dengan monev TL agak berat, karena ini posisi sudah akhir tahun dan masih ada beberapa LHP yang masih dalam proses penyelesaian.
- Inspektur → apa bisa kalau kelapangan itu sekalian dengan monev TL meskipun tanpa SP.
- Inspektur Pembantu 3 → sebetulnya pada saat kelapangan selalu diingatkan terkait monev TL akan tetapi OPD, kecamatan maupun desa masih ada yang belum komitmen dalam penyelesaian TL.
- Sekretaris → mengingat waktu yang hanya sekitar 2 minggu lagi, kita lakukan desk aja, akan tetapi tetap menuntut adanya peran aktif dari para Irban terutama para auditor maupun PPUPD, karena yang lebih memahami TL itu yang melakukan pemeriksaan itu sendiri. Apalagi dalam menentukan status dari tindak lanjut tersebut.

- Inspektur → Baiklah kalau begitu, Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan agar menyiapkan kegiatan desk Tindak Lanjut dengan target 85% dapat dicapai. Dan lakukan pemantauan atas OPD yang tidak memenuhi undangan desk ini, saya akan evaluasi langsung Bersama para kepala dinas / badan / camat untuk komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut. Apalagi tindak lanjut yang bersifat administrasi itu segera untuk diselesaikan.
3. Acara ditutup dan ucapan hamdalah, dan diamanatkan oleh Inspektur agar kegiatan ini segera dilaksanakan dan dimohon peran sertanya dari seluruh Jajaran Struktural maupun fungsional.

Notulis



Ai Herliani